



Politik Identitas di Indonesia antara Nasionalisme dan Agama

Mutiara/210608500012

Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Makassar

Email: mutiaraal923@gmail.com

Abstract

Democratization upholds freedom becomes the basis for actualization of each person. Themselves, including in political matters. Individual freedom guaranteed by the constitution in the state reflects the high popularity of this democratic system. However, this freedom ultimately reinforces the gap between identities (religion, ethnicity, language, gender, etc.) in state especially with regard to national political issues. Questions of religion and nationalism two identities that are currently being discussed in the country. Identity controversy politics escalated until there was an accusation that this interest group then began to divide a nation that is used to respecting differences. This article aims to define the political reality of religious and nationalist groups. For this, qualitative and research methods were used. Study this problem. This study shows that divisions arising from political grouping on the basis of religious identity and nationalism undermined the stability of the country, which characterized by the emergence of critical trust in the authorities, the spread of false news, persecution and limited space for democratization. Etc. Democratization, which defends freedom, becomes the basis for the actualization of each individual, including in political issues. Individual freedom guaranteed by the constitution in the state, reflects the high popularity of this democratic system. However, this freedom, in the end, further clarifies gap between identities in the state especially on national policy issues. Questions of religion and nationalism-two identities which are now being discussed in the country. Identity politics controversy erupted until the allegation that this interest group then began to divide the nation, which previously respected differences. This article aims to define the political reality religious and nationalist groups. For this, qualitative and research methods were used. Problem this study shows that the division that arises from political grouping based on religious identity and nationalism have undermined the stability of the country, which is marked by trust emergence of critical, the spread of false news, persecution, and limited space for democratization.

Key words : Religion, Nationalism and Identity politics

Abstrak

Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan menjadi dasar bagi setiap individu untuk mengaktualisasikan dirinya, termasuk dalam urusan politik. Kebebasan individu yang dijamin konstitusi dalam bernegara mencerminkan tingginya popularitas sistem demokrasi ini. Namun, kebebasan ini pada akhirnya semakin memperjelas kesenjangan antara identitas (agama, suku, bahasa, gender, dan lain-lain) dalam bernegara, terutama yang berkaitan dengan masalah politik nasional. Isu agama dan nasionalisme merupakan dua identitas yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di negara. Polemik politik identitas memanas hingga muncul klaim kebenaran bahwa kelompok, kemudian ketertarikan ini mulai menyelimuti orang-orang yang sebelumnya terasing. Tujuan artikel ini adalah untuk mengungkap realitas politik gerakan keagamaan dan bangsa. pengamatan kualitatif dan penelitian dipakai dalam mempelajari masalah itu. Studi ini menunjukkan hasil pemisahan melalui gerakan politik berdasarkan keyakinan agama dan nasionalisme menghancurkan stabilitas masyarakat, ditandai dengan hilangnya ketidakpercayaan pada kekuasaan, penyebaran berita bohong, persekusi, dan pembatasan ruang demokrasi.

Kata kunci : Agama, Nasionalisme dan Politik Identitas

PENDAHULUAN

Perbaikan sistem demokrasi yang dipraktikkan oleh bermacam pihak yang di bangsa tidak melalui mewujudkan sikap adil terhadap seluruh bagian kemasyarakatan. Padahal, hal itu terwujud dalam melindungi hak umum warga negara, sehingga kebebasan itu sama untuk semua. Demokrasi di bangsa pada dasarnya terus dinamis dengan masalah kebhinekaan yang sering memicu disharmoni antar kelompok. Perbedaan atas dasar keragaman di Indonesia sudah banyak mencatat sejarah sebagai faktor utama munculnya konflik, seperti konflik antar agama, antar suku, antar etnis dan lain-lain.

Konflik-konflik ini berkembang tidak hanya sebagai konflik antara satu identitas tetapi telah memasuki fase baru sebagai konflik antara identitas. Perluasan konflik antar identitas sering dijumpai sebagai bagian dari proses demokratisasi, lebih tepatnya sebagai “demokrasi liar”. “Demokrasi liar” tidak hanya dalam arti demokrasi sebagaimana mestinya diterapkan dalam kehidupan berbangsa, namun keterbatasannya kemampuan dalam menyampaikan demokrasi di negara ini tercipta kerusukan tidak berubah, dalam keengganan untuk mempersatukan dunia kepastian kumpulan agama. Perpecahan argumen dan pendapat antar merupakan macam dari integral dari masalah politik saat ini. Masalah itu kemudian diperparah dengan adanya kelompok yang atas nama nasionalisme sebagai falsafah yang harus dimiliki bangsa Indonesia untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang telah dibuat oleh bangsa Indonesia. Gerakan nasionalis didominasi oleh suku, agama, budaya, dan lain-lain. Ia diwakili oleh organisasi yang kehebis berdasarkan politik identitasnya.

Konflik antar identitas nasionalis dan identitas keagamaan kini semakin menyempit hingga mengganggu stabilitasnya negara. Perpecahan pendapat didalam ini antar kedua kumpulan wilayah ini menimbulkan bermacam persoalan yang sebagai masyarakat besar akibat propaganda dan klaim antar kelompok tentang kebenaran identitas tersebut yang diyakininya, sehingga memunculkan pro kelompok-kelompok pemerintahan dan anti pemerintah. Pengamatan terhadap pemilu di Indonesia yang penting untuk melakukan bagaimana sebuah negara dengan beragam latar belakang, Indonesia telah membuktikan bahwa persatuan dapat dipertahankan sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Deskripsi yang terkandung dalam ini tidak dapat diubah terhadap isi ini. Suparlan (2004:25) menjelaskan bahwa dalam diri sebagai simbol sebagai satu atau kumpulan tepat yang sebagai gabungan utuh, dilihat sebagai penyertaan dan keterlibatan dengan kumpulan masyarakat tersebut. Menyatu menjadi kelompok atau kelompok tertentu tidak terlepas dari selera kesetaraan berdasarkan identitas. Identitas atau identitas ditemukan dalam berbagai bentuk dan jenis seperti identitas gender, agama, suku, profesi, dan lain-lain. Jadi perkumpulan berdasarkan satu identitas bersama membentuk identitas kelompok. Politik identitas pertama kali mendapat banyak perhatian berbagai sistem di Amerika Serikat karena perbuatan keras dan keras antara kulit putih dan kulit hitam. Penganiayaan, pemerasan, dan intimidasi terhadap orang kulit gelap di Amerika telah mengangkat berharganya politik identitas dalam membangkitkan kewajiban sebagai warga Indonesia dalam mewujudkan kewajiban dalam pemerintahan.

Politik identitas mendapat arahan luas sebagai simbol untuk awal adanya di Amerika Serikat terkait sebagai perbuatan berat tebal antar kulit putih dan kulit hitam. Kelak ini keras, penyiksaan bahkan yang dialami warga kulit hitam di Amerika mengangkat pentingnya politik identitas yang mempertahankan kewajiban warga negara yang memiliki kulit gelap yang kebanyakan di negara dan pemerintahan. Cressida Heyes (2007) menjelaskan politik identitas adalah penunjukan yang lebih luas dari aktivitas politik dan berteori tentang penemuan pengalaman ketidakadilan yang dihadapi oleh anggota kelompok sosial tertentu.

Agnes Haller (1995) mendefinisikan politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang berfokus pada perbedaan sebagai kategori politik utama.

Munculnya politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak lepas dari rasa ketidakadilan dan persamaan hak diklaim oleh kelompok atau kelas sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menjadi tolak ukur utama Indonesia keragaman yang ada di Indonesia membuat politik identitas di Indonesia lebih asertif perbedaan. Penghapusan konflik bermotif politik identitas yang berbagai macam yang diciptakan oleh ketidakadilan bangsa. Manual Castells (2003:7-8) menjelaskan identitas dalam politik yang asal dari institusi dominan dalam menciptakan dan mengaktualisasikan kumpulan ada dengan cara keyakinan yang bermanfaat dalam diri mereka sendiri.

Kegiatan politik identitas di Indonesia muncul dan menguat sejak masa proses bahkan bangsa, persamaan identitas menjadi warga negara yang bersatu memunculkan bentuk nasionalisme dalam masyarakat yang menonjolkan politik identitasnya. Bukan hanya nasionalisme yang menjadi tolak indikator utama politik identitas di Indonesia saat ini. Pergulatan bangsa Indonesia yang berpendudukan mayoritas muslim ini juga memberikan kontribusi besar dalam sejarah pergulatan bangsa Indonesia hingga saat ini. Bahwa umat Islam ingin menciptakan identitas keagamaan yang diyakininya melampaui batas negara bukan hanya bersifat teatral, tetapi membentuk hingga nasionalisme dan agama di Indonesia sudah dulu bersinambungan dan mewujudkan kaitan yang sejahtera.

Politik identitas berdasarkan identitas bersama seringkali menjadi akar penyebab konflik politik, terutama yang melibatkan tekanan antar kelompok pemimpin dan lebih rendah atau antara mayoritas dan minoritas, kecuali Indonesia dan konsep kebebasan individu yang mengedepankan Pancasila menjadikan agama sebagai substansi yang keberadaannya dipandang sebagai ancaman terhadap kebhinekaan di Indonesia, khususnya agama minoritas. Studi politik dengan jelas membedakan antara identitas politik dan identitas politik. Identitas politik didefinisikan sebagai konstruksi yang menentukan tempat kepentingan subjek dalam hubungan komunitas politik. Sedangkan perlawanan untuk mengorganisir identitas (baik politik maupun sosial) menjadi potensi dan alat politik (Mukhtar Khaboddin, 2012:119). Penelitian politik identitas mencakup dua faktor identitas yang terkenal, adalah strategi sosial dan strategi agama menjadi subjek.

Strategi sosial mencakup strategi agama, kelas, ras, suku, dan kesadaran diri, dengan strategi sosial membentuk kedudukan seseorang yang hubungan dan interaksi sosial, dan identitas politik meliputi nasionalisme dan kebangsaan, dengan identitas politik penentuan posisi seseorang dan masyarakat secara pasti. Melalui rasa memiliki, serta indikasi posisi subjek lain dalam kaitannya dengan perbedaan (Fitri Ramdhani Harahap, 2014: 803-804). maka soal di Indonesia dipandang menjadi poin politik yang meraih kekuatan. Pentingnya politik identitas menjadi poin politik menerangkan oleh Kemala Chandakirana yang mengatakan bahwa politik identitas dipergunakan sebagai retorika politik oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan apa yang kita inginkan "orang pribumi" berkuasa dan mereka untuk "pendatang baru" yang harus dilepaskan kekuatan (Muhtar Haboddin, 2012 :120). Jadi kamu bisa menyimpulkan bahwa politik identitas hanyalah alat yang digunakan oleh penguasa untuk memanipulasi dan memobilisasi kekuasaan untuk memenuhi kepentingan ekonomi dan politik. Ini tidak lain adalah tren yang mutlak bagi mereka yang berkuasa.

Politik identitas menawarkan kesempatan yang sangat baik untuk menyeimbangkan dan mendemokratisasikan bangsa. Misalnya,, politik identitas yang dapat mewujudkan di dua kekuasaan besar yang didominasi oleh nasionalis dan muslim, jika tidak diproduksi lagi baik dan bijaksana, akan berujung pada kehancuran bangsa. Konflik antara dua strategi dilihat bisa

membahayakan stabilitas negara jika pemerintahan tidak mempunyai kemauan politik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bukan hanya kebutuhan politik yang dikorbankan, tetapi juga keperluan masyarakat luas, karena politik identitas adalah politik.

Kajian Fitri Ramadhani Harahap (2014) berjudul “Politik Identitas Berbasis Agama” mengemukakan hingga pluralitas strategi di Indonesia diancam oleh politik identitas yang berujung pada rusaknya keutuhan kehidupan beragama yang selama ini dipertahankan. Waktu yang lama. Politik strategi menjadi persoalan berketunan dan bernegara mewujudkan deminasi aliran luas kelompok kebutuhan yang mengambil dan menghilangkan kumpulan lawan atau kumpulan golongan. Politik identitas yang dominan di negara ini merupakan politik strategi agama sebagai merepresentasikan eksklusivitas muslim di Indonesia yang turut mendukung adanya politik bangsa yang menimbulkan isu agama yang mendefinisikan kekuatan politik dan menonjol yang menimbulkan konflik-sosial agama.

Penelitian yang membahas oleh penulis mempunyai kesamaan dan perpecahan dengan penelitian yang membahas oleh Fitri Ramdhani Harahap. Kemiripan penelitiannya terletak pada masalah manajemen konflik. Sementara perbedaan dalam penelitian ini terletak pada esensi dari adanya kebijakan identitas agama yang bukan menjadi faktor utama penghancuran integritas, tetapi juga identitas nasionalis yang melahirkan disharmoni yang politik. Apalagi, penelitian sebelumnya oleh Ahmad Siafiya Maarif (2012) dengan judul “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia” mengatakan ialah politik identitas di bangsa lebih banyak pada isu kepentingan etnis, agama dan lokal, biasanya diwakili oleh para ahli dengan perubahan yang politik identitas atas nama agama (Islam) seperti MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan PKS (Partai Keadilan Sosial) ini membahas kedudukan negara dan bangsa. Memiliki Pancasila dipromosikan menjadi sifat umum atau rekomendasi untuk Indonesia di masa lalu, sekarang dan masa depan. Kesamaan kajian penulis dan Ahmad Siafi Maarif ini adalah membahas tentang kelompok, bukan rasa nasionalisme. Kajian pada dasarnya topik definisi agama (Islam) yang disebut Maarif menjadi arahan bagi bangsa dan penelitian penulis, identitas agama (Islam) adalah dasar untuk melindungi identitas bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian tersebut digunakan untuk tujuan kualitatif (Moleong, 2002), adalah kajian didalamnya tidak memiliki hitungan yang menitikberatkan pada sifat sumber informasi. Kajian tersebut dijelaskan dalam secara detail dengan dianalisa permasalahan politik strategi di negara bermuatan masalah negara dan masalah agama. Ciri kajian itu merupakan penelitian deskriptif-analitik kata ditulis dan lisan dari situasi yang diteliti terkait dengan masalah politik strategi antar strategi dan negara dan identitas.

Dari informasi terkandung kajian ini disiapkan dengan mencari informasi penelitian kepustakaan dengan mencari informasi sekunder berupa info, data, buku, artikel dan jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam mencari informasi dalam kajian itu digunakan metode deskriptif kualitatif ialah metode menganalisa informasi dengan mencari gambar, narasi dan deskripsi informasi kualitatif. Tahapan analisa informasi terkandung kajian itu menutupi pembukuan dan analisis hasil informasi yang didapatkan dari macam penerbit, menyiapkan, mensintesis, meringkas dan mendefinisikan informasi yang jelas dengan waktu masalah, data yang telah diklasifikasikan lalu dianalisa bagaimana menemukan arti, kaitan yang menghubungkan hasil dengan pernyataan masalah.

Analisis data kemudian divalidasi untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya. Handal dan terpercaya dengan menggunakan metode triangulasi yang merupakan sumber

informasi yang ada, bandingkan hasil perhitungan dengan langkah yang terbaik kemudian bandingkan dengan studi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik identitas di negara diwarnai oleh berbagai masalah terkait konflik di antara mereka mengaku patriot dan mengaku religius. Dengan demikian, wahyu kebenaran bergerak di antara mereka pada tingkat yang lebih tinggi membedakan batas mereka. Lihatlah lebih dekat, sejarah kemerdekaan Indonesia dari waktu yang begitu lama sejauh ini terbukti menjadi landasan agama (Islam) telah memberikan kontribusi besar bagi pembentukan negara ini Indonesia, bersama dengan penyelesaian dan Pancasila, disepakati sebagai tulang punggung Indonesia. Selain, memperebutkan kekuatan politik membahas sejarah, berubah menjadi kebangsaan. Agama adalah sarana kekuatan informasi.

Keyakinan agama bagi kebanyakan orang di Indonesia adalah agama internal. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari urusan publik. Namun, dengan penyebarannya ideologi sekunder, pluralistik dan literal yang mempromosikan segregasi antar negara dan agama dan advokasi konsep kecil lambat laun mulai mengaburkan persatuan antar umat Islam di Indonesia pun berbeda, apalagi antar umat Islam, bahkan merusak solidaritas yang ada terbentuk di antara keberagaman di wadah saat ini.

Perbincangan negara sudah lama dilihat yang menjadi semangat antarsuku, agama, suku, golongan dan lain-lain di Indonesia sebagai bentuk perlawanan kolonialisme menciptakan integrasi yang harmonis sebelum kemerdekaan Indonesia dicapai melalui kerja sama antar keanekaragaman. Tetapi negara terlihat memanasifasikan dirinya menjadi kesadaran dengan kumpulan nasional terlihat telah menciptakan oleh kumpulan tersebut.

Masalah perpecahan politik identitas di Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan kepentingan politik yang didorong oleh elit politik untuk mendapatkan untuk mempertahankan kekuasaan dengan memanipulasi politik identitas di Indonesia. Perpecahan antara kelompok nasionalis dan agama dinilai mampu memberikan peluang untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah saat ini dalam menangani masalah negara terutama terkait dengan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

Krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak kompeten memecahkan masalah masyarakat luas yang menyebabkan munculnya kepentingan politik dalam rangka menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Berbagai kebijakan yang memunculkan di masyarakat antara lainnya, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kenaikan biaya pangan, kenaikan nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Perjuangan politik identitas Indonesia juga didera suasana pemilihan parlemen (pemilu) yang kerap sarat dengan politik. Agama harus dipisahkan dari urusan publik. Mengangkat isu penistaan agama, membuat agama minoritas merasa didiskriminasi oleh mayoritas. Ada argumen dia kemudian melanjutkan ke pertanyaan kebingungan yang lebih penting agama ke politik. Pemilu biasanya tentang memperebutkan kekuatan menghasilkan berbagai cara sampai agama yang miskin.

Teknik memilih ini yang harus contoh utama menunjukkan perbedaan semangat antar negara dan agama Indonesia. Gagal dalam manajemen untuk mengadakan pemerintahan yang adil dan bijaksana, ditambah dengan keserakahan yang memegang kekuatan sebagai politik identitas menjadi bimbingan utama cara untuk memenangkan sebuah pemilihan. Membimbing dan membentuk argumen tentang rasa kebhinnekaan yang bernegara dan terpecah persoalan bangsa. Meski tidak bisa dihindari, mayoritas pemeluk agama di bangsa memang sudah lama menerapkan bentuk nasionalisme dalam organisasi unsur pemerintah

di Indonesia, yaitu pengesahan Pancasila menjadi dasar menghargai, internal agama dengan pengakuan eksistensi kelompok.

Siapa, apa dan bagaimana seharusnya persoalan politik perbatasan dilihat nilai dari secara umum, penggunaan kebijakan simbol yang membahas masalah prioritas untuk menyerap gambaran orang atau kumpulan masalah agama menyebabkan perpecahan besar dan mengancam patriotisme negara. Perebutan politik identitas ini kemudian dilakukan melalui berbagai pemberitaan di media orang saling menuduh baik dan jahat, kedua belah pihak. Jumlah perhatian, bahkan dalam beberapa menit, yang mengarah ke masalah kebijakan identitas yang tidak dapat dikelola dan menimbulkan masalah baru terkait penyebaran berita yang tidak pasti keasliannya kebanyakan kasus hoax.

KESIMPULAN

Perpecahan yang muncul akibat pengelompokan politik berdasarkan identitas agama dan nasionalisme ini menyebabkan terganggunya stabilitas negara yang bercirikan munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah, penyebaran berita palsu, penuntutan, penipuan, ruang demokrasi terbatas, dan lain-lain. Substansi dari adanya politik identitas agama bukanlah faktor utama perusak keutuhan bangsa di negara, namun identitas negara juga sebagai alat adanya disharmoni politik strategi di bangsa sekarang ini. Identitas keagamaan (Islam) adalah tidak ditemukan pondasinya pembentukan identitas nasional Indonesia, begitulah sehingga politik identitas di negara disikapi menjadi persediaan ruangan dan berita yang luas bagi media menunjukkan adanya agama (Islam) dan nasionalisme itu berjalan dan mempunyai satu misi, ialah mempertahankan hak Indonesia, jangan sampai konflik antara keduanya semakin memanas diperluas secara intensif dengan menyajikan rangkaian dan info yang terkandung dalam pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Castells, M. (2003). *The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural*. Vol II. Blackwell Publishing: Australia.
- Haboddinn, M. (2012). *Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*. *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 1 Februari 2012, Hal. 109-126.
- Harahap, FR. (2014). *Politik Identitas Berbasis Agama*. *Prosiding Sosiologi Konflik dan Politik Identitas*. Yogyakarta.
- Heller, A dan Punsher, S. (1995). *Biopolitical Ideologies and New Social Movements*. *A New Handbook of Political Societies*. Blackwell Oxford.
- Heyes, C. (2007). *Identity Politics* Stanford Encyclopedia of Philosophy. Diakses 13 September 2018, dari: Plato. Stanford. Edu/entries/identitypolitics.
- Maarif, AS. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*. Democracy Project: Jakarta.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Suparman, P. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. KIK Press: Jakarta.